



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3866120/Dering DJPK 150420, FAKSIMILE (021) 3866120, SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Daftar Rancangan Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan Tahun 2024

No.	Judul Peraturan
1	RPMK tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
2	RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility
3	RPMK tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
4	RPMK tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
5	RPMK tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah
6	RPMK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus
7	RPMK tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
8	RPMK tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
9	RPMK tentang Pedoman Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
10	RPMK tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11	RPMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
12	RPMK tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025
13	RPMK tentang Tata Cara Evaluasi dan Penundaan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
14	RPMK tentang Keselarasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Regional
15	RPMK tentang Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
16	RPMK tentang Tata Cara Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dukungan Pendanaan yang Bersumber dari Pemerintah bagi Sinergi Pendanaan Daerah
17	RPMK tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah
18	RPMK tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Transfer Ke Daerah yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
19	RPMK tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional